



Pemkab Melawi Akan Terus Benahi Persoalan Aset

NANGA PINOH, SP - Persoalan aset Pemkab Melawi yang belum tertata baik membuat kabupaten ini mendapat opini Warjar. Dengan Pengecualian (WDP) dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Karena itu, Pemkab Melawi berupaya untuk membenahi persoalan aset.

Bupati Melawi, Panji saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, selama ini aset Melawi kerap menjadi bahan dan menjadi catatan oleh BPK. Karena masih banyak aset daerah yang harus dituntaskan.

"Ada aset yang sudah bersertifikat, tapi ketika diukur di lapangan ternyata luasnya masih kurang atau tempatnya tidak ter-

lalu tepat. Ini yang harus disesuaikan," katanya.

Panji juga mengungkapkan, ada beberapa aset yang nilainya belum sepenuhnya bisa dihitung, karena dahulu aset tersebut merupakan pelimpahan dari kabupaten induk (Sintang) saat pemekaran kabupaten.

"Bahkan aset Provinsi juga ada disini dan bukti kepemilikan yang sah belum cukup lengkap, walau sebenarnya memang tidak ada masalah," katanya.

Dilanjutkannya, pemerintah tentunya mau persoalan aset ini bisa segera dituntaskan. Langkah pemerintah saat ini untuk membenahi aset tersebut dengan melakukan inventarisasi aset, statusnya seperti apa, kemudian menegaskan

aset tersebut milik Kabupaten Melawi atau milik Provinsi Kalbar.

"Kala masih ada aset provinsi yang tidak terlalu banyak, dan kita juga punya tanah atau aset lain yang berdampingan, boleh kita tukargulingkan. Yang ini misalnya tanah provinsi kita serahkan dan aset provinsi di bidang lain kita minta. Tapi tentu kita melihat aturan," jelasnya.

Panji menegaskan, ia ingin memperjelas status kepemilikan aset di Melawi. Bila memang ini bukan aset pemerintah, maka diserahkan kepemilikannya pada yang berhak.

"Namun, bila ini merupakan aset pemerintah, maka legal formalnya juga harus dilengkapi," pungkask Panji. **(eko/jee)**